



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 100.3.1.2/1 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna tertib pelaksanaan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas sebagai penjelasan dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PEKALONGAN,



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan  
Nomor : 100-3.1.2/1  
Tanggal : 2 Januari 2024

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2024

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023	BPKD
2.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2024	BPKD
3.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2025	BPKD
4.	Klasifikasi besaran NJOP Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2025.	BPKD
5.	Standar Biaya kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.	BPKD
6.	Analisa Standar Belanja.	BPKD
7.	Petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari APBD Tahun 2024.	BPKD
8.	Kartu Kredit Pemerintah Daerah.	BPKD
9.	Hibah dan Bantuan Sosial	BPKD
10.	Belanja Tidak Terduga	BPKD
11.	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pekalongan	DINAS P3A DAN PPKB
12.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	BAPPEDA LITBANG
13.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	BAPPEDA LITBANG
14.	Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	BAPPEDA LITBANG
15.	Penyelenggaraan Keolahragaan	DINPORAPAR
16.	Kepemudaan	DINPORAPAR
17.	Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	DINPORAPAR
18.	Pengelola Daya Tarik Wisata	DINPORAPAR
19.	Kebijakan Umum Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	DINKOP UKM NAKER
20.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten pekalongan Tahun 2024-2028	DINHUB
21.	Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Kawasan Kajan	DINHUB

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
22.	Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa	DINAS PMD
23.	Petunjuk Teknis Dana Desa	DINAS PMD
24.	Petunjuk Teknis APBDes	DINAS PMD
25.	Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan tentang BUMDES	DINAS PMD
26.	Batas Desa	DINAS PMD
27.	Standar Pelayanan Minimal Desa	DINAS PMD
28.	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.	DISDUKCAPIL
29.	Pendaftaran Penduduk Non Permanen.	DISDUKCAPIL
30.	Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
31.	Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.	INSPEKTORAT
32.	Perubahan Atas Perbup Pekalongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemkab Pekalongan.	INSPEKTORAT
33.	Perubahan Atas Perbup Pekalongan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	INSPEKTORAT
34.	Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang	DINPERINDAG
35.	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	DINPERINDAG
36.	Perubahan Remunerasi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan	DINAS KESEHATAN
37.	Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan.	DINAS KESEHATAN
38.	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Permohonan Rencana Strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Kabupaten Pekalongan.	DINAS KESEHATAN
39.	Perubahan Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.	RSUD KRATON
40.	Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.	RSUD KRATON
41.	Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Kajen	RSUD KAJEN
42.	Tugas Belajar PNS	BKPSDM
43.	Pemberian Penghargaan ASN	BKPSDM

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
44.	Pengelolaan Kinerja ASN	BKPSDM
45.	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
46.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
47.	Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	BAGIAN ORGANISASI
48.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.	BAGIAN ORGANISASI
49.	Standar Kompetensi Jabatan ASN	BAGIAN ORGANISASI
50.	Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
51.	Tata Naskah Dinas	BAGIAN ORGANISASI
52.	Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.	BAGIAN ORGANISASI
53.	Perubahan Perbup No. 66 Tahun 2021 tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026.	BAGIAN ORGANISASI
54.	Usaha Pembudidayaan Ikan	DINLUTKAN
55.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan Pemungutan Retribusi Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi	DINLUTKAN
56.	Perubahan Perbup No. 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi tempat Pelelangan Ikan	DINLUTKAN
57.	Arsitektur Infrastruktur sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/e-Government.	DINKOMINFO
58.	Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pengembangan e-Government.	DINKOMINFO
59.	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	DINKOMINFO
60.	Perubahan atas Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.	DINAS PERKIM DAN LH
61.	Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan.	DINAS PERKIM DAN LH

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
62.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
63.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR
64.	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
65.	Recana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2026	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



BUPATI PEKALONGAN,

FADIA RAFIQ